

TAREQAT DAN POLITIK; Studi Kiprah Politik Kaum Sufi
Hasan Bakti Nasution
Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara
hasanbaktinasution@gmail.com

Abstrak:

Tareqat dalam perkembangannya mengalami transformasi tidak hanya sekedar metode penyucian jiwa, juga memasuki bidang kehidupan lainnya, yaitu politik, sebagai sebuah dunia yang dianggap tabu sebelumnya. Keterkaitan kaum sufi dalam bidang politik tampil dalam bentuk secara tidak langsung dan secara langsung. Secara tidak langsung ialah dengan memberikan dukungan kepada penguasa politik (kepala daerah), sedangkan secara langsung ialah dengan menjadi anggota legislatif (DPR) dan tampil sebagai khalifah/raja atau kepala daerah.

Ada tiga faktor kaum sufi memasuki kancah politik, yaitu kedekatan tokoh sufi dengan penguasa politik (penguasa), keinginan menyeharikan nilai-nilai Islam, dan tanggung jawab teologis. Keterkaitan dengan politik ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah semakin memudahkan menyeharikan ajaran Islam dalam kehidupan yang lebih luas. Sedangkan dampak negatifnya ialah tergoresnya ajaran sufi yang asli yang dipahami secara tradisional yang pesimis. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut kehadiran tasawuf modern atau tasawuf fungsional menjadi kata kunci. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat di antara kaum sufi dengan politik, yaitu sama-sama berupaya menyeharikan nilai Islam dalam kehidupan sebagai sebuah tanggung jawab teologis.

Keyword: *Tareqat, politik, kiprah, kaum sufi*

A. Pendahuluan

Kajian tentang politik merupakan persoalan yang terus mendapat perhatian manusia, karena memang seperti kata Aristoteles, manusia adalah makhluk politik (*zoon politikon*). Sebab itu persoalan politik selalu dihubungkan dengan seluruh persoalan kehidupan; sosial (politik sosial), ekonomi (politik ekonomi), hukum (politik hukum), agama (politik agama),

dan lain-lain. Bahkan dikaitkan dengan salah satu bidang agama Islam, yaitu tareqat. Kajian politik menjadi lebih menarik perhatian para ahli, karena secara umum di antara tasawuf atau tareqat dengan politik dipandang tidak memiliki kaitan, karena keduanya, ibarat bumi dan langit. Politik berbicara tentang urusan dunia dengan berbagai romantikanya, sedang tasawuf atau tareqat berbicara tentang akhirat dengan cirinya yang kontroversial dengan dunia.

Namun pandangan umum ini akan terkoreksi jika melihat fakta dalam sejarah perkembangan tasawuf atau tareqat, di mana pengamal tasawuf atau tareqat mengambil peran penting dalam bidang politik, baik secara langsung dalam arti menjadi penguasa eksekutif dan anggota legislatif, maupun secara tidak langsung dalam arti para tokoh tasawuf atau tareqat mengambil peran sebagai penasehat penguasa politik (kepala daerah, raja/khalifah).

Hal ini tentu belum menjadi pengetahuan umum, sehingga kurang dikenal oleh semua lapisan masyarakat. Padahal fakta historis menunjukkan betapa keterkaitan itu terjadi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Menghindari terjadinya kekurang pemahaman tersebut tentu membutuhkan uraian khusus, dan atas pertimbangan itulah tulisan ini disampaikan. Sistematika penulisan terdiri dari: pendahuluan, pengertian tareqat dan politik, faktor-faktor sufi memasuki politik, beberapa kasus, kekuatan dan kelemahan, dan penutup.

B. Pengertian

Sebelum menguraikan kiprah kaum sufi dalam bidang politik terlebih dahulu dijelaskan pengertian tareqat dan politik, sebagai berikut:

1. Tareqat.

Kata tareqat atau tarikat berasal dari bahasa Arab *thariqat* (طريقة) dari kata *thariq* (طريق) yang berarti jalan, keadaan, aliran atau garis pada sesuatu.¹ Tareqat ialah istilah bagi salah satu kelompok sufi yang berupaya memperoleh hakekat. Untuk sampai pada tahap makrifat, seorang pengamal tareqat melewati empat tahapan, yaitu *syari'at*, *thariqat*, *hakikat*, dan *makrifat*. Atau jalan yang harus ditempuh oleh seorang calon sufi dalam tujuannya berada sedekat mungkin dengan Allah, sesuai dengan tujuan tasawuf, yaitu agar sedekat mungkin berada dekat Allah yang disebut dengan *muqarabah*.

Sedangkan menurut istilah tarekat adalah organisasi dari pengikut sufi-sufi besar. Mereka mendirikan organisasi-organisasi untuk melestarikan ajaran-ajaran tasawuf gurunya. Maka timbullah tarekat, yang mempunyai syekh, upacara ritual, dan zikir. Prakteknya

¹Luis Makluf, *Al-Munjis fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 465.

dilakukan di suatu tempat sebagai pusat kegiatan yang disebut *ribat*, *zawiyah*, *hankah* atau *pekir*.²

Para ahli memberikan ragam interpretasi tentang tareqat. Menurut Martin van Bruinessen, ungkapan tareqat berkaitan dengan doktrin, metode dan ritual, dan juga berkaitan dengan organisasi yang menyatukan para pegikut tareqat, dan kedua makna ini digunakan dalam konteks Indonesia.³ Sedangkan menurut John O. Voll, istilah tareqat digunakan untuk organisasi sosial maupun kewajiban-kewajiban yang ditunjukkan untuk maksud khusus yang menjadi basis ritual dan struktur kelompok, dengan demikian, kelompok sufi atau tareqat mencakup spektrum aktifitas yang luas dalam sejarah dan masyarakat Muslim.⁴

Selanjutnya Abu Bakar Atjeh, memberi definisi tareqat secara luas dengan: “jalan atau petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi’in, turun temurun sampai kepada guru-guru. Atau suatu cara mendidik, mengajar, lama kelamaan meluas menjadi kumpulan kekeluargaan yang mengikat penganut-penganut sufi yang sefaham dan sealiran, guna memudahkan menerima ajaran-ajaran dan latihan-latihan daripada pemimpinnya dalam suatu ikatan”.⁵

2. Politik.

Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota atau negara kota.⁶ Dari kata *polis* ini kemudian muncul kata-kata lain, seperti *polites*= warganegara; *politikus*= kewarganegaraan (civic); *politike techne*= kemahiran politik dan *politike episteme*= ilmu politik,⁷ yang kemudian diambil over oleh Rumawi dan menamakannya sebagai pengetahuan tentang negara (pemerintahan)/ “arts politika”, yang berarti juga kemahiran (*kunst*) tentang masalah-masalah kenegaraan.⁸

Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa teori tentang politik,⁹ seperti:

²Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, jilid II (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 89.

³Martin van Bruinessen, *Tareqat Naqsyabandiyah di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 61. Selanjutnya ditulis *Tareqat*.

⁴John O. Voll, *Tareqat-tareqat Sufi*, dalam John L. Esposito, *Dunia Islam Modern*, jilid 5 (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 215.

⁵Abu Bakar Atjeh, *Tareqat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 47-54.

⁶F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Puspita Bandung, 1980, hlm. 21, dan Karya Anda, *Kamus Populer*, Karya Anda, Surabaya, tt., hlm. 250.

⁷R.M. Gillrist, *Principle of Political Science*, Grient Longmans, Madras, 1957, hlm. 1.

⁸F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, hlm. 250.

⁹Orang pertama pemakai istilah politik (*science politique*) sering dikaitkan dengan Jesn Bodin dalam *chep d'oeuvre*-nya, *Les six Livres de la Republique*, terbit tahun 1576. Kemudian diikuti oleh Thomas Fitzherbert,

1. Usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, seperti teori yang diajukan Aristoteles
2. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
3. Kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di dalam suatu masyarakat
4. Segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
5. Segala yang berhubungan dengan cara-cara atau kebijaksanaan pemerintah dalam mengatur negara dan masyarakat suatu negara".¹⁰
6. Berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu serta pengambilan keputusan menjadi apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik dan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber dan resources yang ada".¹¹

Perbedaan makna di atas tidak terlepas dari sudut pandang yang dilakukan, namun dari berbagai teori di atas dapat disederhanakan bahwa politik ialah kegiatan yang berkaitan dengan upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan (selama di dunia). Secara aksiologi tentu ilmu ini bertentangan dengan tarekat yang cenderung berorientasi akhirat sedang politik dunia. Jika kedua kata ini digabung dapat diajukan persoalan pokok, yaitu bagaimana kalangan tarekat meraih kekuasaan dan kemudian mempertahankannya.

Variasi pendefinisian tidak terlepas dari faktor ekstern dan intern. Faktor ekstern dimaksudkan ialah pemerhati politik tersebut, di mana antara satu ahli dan ahli lainnya terjadi sudut titik yang varian, sesuai dengan kemampuan, latar belakang dan kondisi psikologis, ekonomis dan agama pemerhati politik dimaksud. Kesemua faktor itu menentukan bagai cara pandang politisi tentang politik, sehingga muncullah ungkapan liberal, serba bebas; tekstual, terkait dengan teks, modernis, terkait dengan perkembangan kekinian, dan sebagainya.

Faktor internal dimaksud ialah sisi apa dari politik yang dicermati; apakah tinjauan filosofinya (*philosophy of politic*), tinjauannya sebagai ilmu (*science of politic*) tinjauan praktisnya (*practical of politic*), tinjauan fungsinya (*functions of politic*), dan lain-lain.

C. Faktor-Faktor Sufi Memasuki Politik

Jeremy Bentham dan Wiliam Godwin tahun 1604.⁹ Kemudian berkembang lagi sehingga dikenal istilah *political science, the science of politics* dan *politics* saja. R.N. Gilchrist, *Loc. Cit.* ; George B. de Huzler dan Thomas H. Stevenson, *Political Science an Out Line* (1956).

¹⁰ Karya Anda, *Kamus Populer*, (Surabaya: Karya Anda, tt.), hlm. 154.

¹¹ Hakim Nya' Pha, *Politik Hukum Indonesia*, Pascasarjana IAIN Arraniry, Banda Aceh, 1993, (bahan Kuliah).

Salah satu ajaran pokok dalam tasawuf/tareqat ialah zuhud yang dalam makna tradisional meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Berpijak pada ajaran dasar inilah muncul pandangan bahwa kalangan sufi atau tokoh tareqat berupaya menjauhi dunia dengan segala kesenangannya dengan mangasingkan diri di lokasi tareqat (persulukan). Mereka menyibukkan diri dengan beribadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun dalam perkembangannya terjadi fenomena bahkan fakta bahwa kalangan sufi memasuki dunia politik. Terjadinya pergeseran ini sekaligus membuat para ulama terlibat dalam bidang politik tidak terlepas dari berbagai faktor, di antaranya: ¹²

a. Kedekatan tokoh sufi dengan penguasa.

Dalam konteks Indonesia, kedekatan tokoh sufi dengan penguasa telah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda, tentu dengan motivasi yang varian. Pada zaman penjajahan Belanda kedekatan penguasa Islam dengan pimpinan tareqat dilatari oleh kepentingan dan keinginan bersama untuk mengusir penjajah Belanda dari daerah Islam. Penguasa Islam tidak ingin dikuasai oleh Belanda, sedangkan pimpinan tareqat tidak ingin penjajah berkuasa karena akan memberikan tekanan dan ketidakbebasan dalam menjalankan ajaran agama. Sebab itulah para kolonial yang menenajajah dunia Islam seperti Belanda, Perancis, Italia, dan Inggris memandang gerakan tareqat sebagai sebuah perlawanan politik. ¹³

Pada masa kemerdekaan hubungan terus berlanjut, karena kedua belah pihak ingin meraih keuntungannya masing-masing melalui kedekatan tersebut. Penguasa, melalui kedekatan dengan tokoh tareqat akan mendapat dukungan suara dari anggota tareqat yang tersebar di berbagai daerah. Seperti dimaklumi bahwa hubungan anggota dan pimpinan tareqat, atau di antara murid dengan syekh tareqat begitu kuat, salah satu perwujudannya ialah kepatuhan murid kepada guru. Seorang murid diikat oleh sekian adab (tatakrama) kepada syekh tareqat, seperti kepatuhan utuh tanpa terkecuali. Kepatuhan kepada pimpinan tareqat menjadi penting, karena jika tidak seorang murid akan kehilangan moment dalam menjalani proses tareqat.

Kondisi kedekatan ini dicermati oleh para penguasa sebagai sebuah peluang meraih suara/dukungan secara mudah. Hanya dengan mendekati sang syekh tareqat akan dapat diraih ratusan atau ribuan suara sesuai dengan jumlah murid sang pimpinan tareqat. Dengan prinsip “sekali dayung sekian pulau akan dilalui” sang penguasa akan mengadakan

¹² Imam Suprayogo, *Kiyai dan Politik, Membaca Citra Politik Kiyai* (Malang: UIN Malang, 1999), hlm. 1-3.

¹³ Martin van Bruninessen, *Pesanteren dan Tareqat* (Bandung: Mizan, 1985), hlm. 27-28.

pendekatan kepada pimpinan tareqat dengan berbagai cara, termasuk dengan menjadi murid, memberikan bantuan finansial atau hibah, dan sebagainya.

Di sisi lain, kondisi ini tidak jarang diambil kesempatan oleh pimpinan tareqat, apalagi jika berhadapan dengan kepentingan pengembangan lokasi pengamalan tareqat (Persulukan). Tawaran bantuan hibah dari penguasa tentu akan diterima dengan sepenuh hati, yang sudah barang tentu dengan berbagai konsekuensi. Apabila pimpinan tareqat sudah menerima bantuan, sebagai ucapan terima kasih, diminta atau tidak, akan memberi dukungan bagi penguasa dengan persetujuan terhadap berbagai program sang penguasa. Jika penguasa akan mengikuti pemilihan kembali, tidak jarang sang pimpinan tareqat akan menyuarakan sang calon kepada para muridnya, bahkan kepada masyarakat sekitar.

Bertemunya dua kepentingan ini menjadi faktor penting semakin eratnya hubungan penguasa dan pimpinan tareqat. Seberapa jauh hubungan tersebut tentulah bukan hal penting, namun dalam konteks pimpinan tareqat hal ini menjadi salah satu faktor melibatkan diri dalam bidang politik secara tidak langsung.

b. Keinginan menyeharikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata.

Jika faktor keterlibatan politik di atas diambil kesempatan pimpinan tareqat untuk memperoleh bantuan hibah, seperti bantuan sarana dan prasana persulukan, tidak jarang juga pimpinan tareqat menggunakan momen kedekatan dengan penguasa sebagai peluang menyampaikan pesan-pesan moral, sehingga pembangunan yang berlangsung sejalan dengan nilai-nilai Islam, sejalan dengan ajaran tareqata secara khusus. Upaya mensucikan diri (*takhalli*) sebagai ajaran pokok tareqat haruslah menjadi gerakan kolektif, tidak hanya sebatas pengamal tareqat saja melainkan kepada seluruh lapisan masyarakat.¹⁴

Upaya ini tentu membutuhkan upaya keras dengan mengerahkan semua upaya dan melibatkan berbagai lapisan, termasuk penguasa. Peran penguasa menjadi sangat penting di kalangan masyarakat yang kharismatis, di mana penguasa diajarkan sebagai "role model". Sesuai dengan paradigma "keberagamaan masyarakat ditentukan oleh keberagamaan penguasanya" (*an-nasu 'ala dini mulukihim*),¹⁵ melalui keterlibatan penguasa politik maka upaya menyeharikan nilai-nilai Islam menjadi sesuatu yang tidak

¹⁴ Dalam proses penyucian jiwa dalam dunia tareqat dikenal tiga teori, yaitu *takhalli*, *tahalli*, dan *tajalli*. *Takhalli* ialah menjauhkan diri dari perbuatan jahat, *tahalli* mengisi dengan perbuatan baik, dan *tajalli*, seorang merasa akan dekat dengan Tuhan.

¹⁵ Teori ini diajukan oleh Ibn Khaldun setelah mengamati berbagai dinasti Islam. Seberapa kuat pengamalan ajaran Islam terkait erat dengan seberapa kuatnya penguasa Islam, sehingga tercatat beberapa penguasa Islam yang *concern* terhadap Islam, dan menentukan bagi kemajuan penerapan ajaran Islam.

mustahil. Dengan demikian, keterlibatan tokoh tareqat dalam politik melalui faktor ini dan juga faktor pertama bersifat secara tidak langsung.

c. Tanggung jawab teologi

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya pimpinan tareqat memasuki dunia politik ialah tanggung jawab teologi, yaitu dorongan agar nilai-nilai Islam dikehendaki dalam kehidupan. Agama, selain sebagai pengalaman pribadi juga sebagai tindakan yang dipandang sebagai nilai-nilai ilahiyah.¹⁶ Di dalam salah satu ayat, al-Qur'an menegaskan kepatuhan kepada perintah Tuhan dan rasul-Nya adalah harga mati, sebagaimana ayat yang berbunyi: *"Tidaklah pantas seorang mukmin apabila Allah dan rasul-Nya memutuskan suatu untuk memilih selainnya. Siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata"* (Q.S. al-Ahzab: 36).¹⁷

Pilihan mutlak itu kemudian dijabarkan dalam ikrar individu setiap kali melaksanakan shalat dengan ungkapan: "Sesungguhnya shalatku, hidup dan matiku demi Allah pemilik alam raya". Bagi seorang Muslim sejati, pengamalan agama adalah hidup, yang juga harus diikrarkan dengan ungkapan: "Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan rasul-ku". Hal ini terkait dengan keseluruhan ajaran Islam. Pengamalan tareqat tentulah tidak hanya sebatas zikir dan mengasingkan diri, melainkan keseluruhan ajarannya, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Pengamalan ini akan lancar jika mendapat dukungan sepenuhnya dari penguasa, namun seringkali penguasa lebih mengedepankan pertimbangan pragmatis kekuasaan, sehingga mengabaikan penerapan nilai-nilai keislaman.

Oleh karena itu, faktor ketiga ini menjadi lebih mendasar (radikal) dan karenanya sangat penting. Jika dua faktor sebelumnya para pimpinan tareqat melibatkan diri dalam bidang politik secara tidak langsung dengan memberikan dukungan moral kepada penguasa, maka faktor ketiga ini melibatkan diri dalam kancah politik secara langsung dengan menjadi mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau menjadi penguasa sebagai kepala daerah atau raja/khalifah. Hal ini tentu adalah hal yang wajar ketika seseorang (termasuk pimpinan tareqat) mendapat dukungan publik akan memasuki dunia politik tersebut, kendati sebelumnya diabaikan atau bahkan ditolak.

Ikhwanul Muslimin di Mesir, misalnya, pada awal berdirinya tahun 1928 adalah sebuah gerakan dakwah dan pendidikan, namun ketika mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat kemudian beralih menjadi gerakan politik sejak tahun 1936, delapan

¹⁶ Martin E. Marty, *Menyingkap Pengalaman Religius Manusia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 31.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 673.

tahun setelah berdiri.¹⁸Gerakan politik yang dilakukan ialah dalam berbagai bentuk, seperti mengirim surat kepada Perdana Menteri Mesir dan pemimpin dunia Islam lainnya agar menjadikan Islam sebagai tatanan hidup (*nizam*).¹⁹Cara lainnya ialah dengan meminta Inggris agar angkat kaki dari Mesir dan Israel dari Palestina. Termasuk agenda politiknya ialah meminta pembubaran partai-partai di Mesir yang tidak lagi menyuarakan aspirasi rakyat.²⁰

Hal ini tentu bukan satu-satunya alasan, karena masih terdapat alasan lain, seperti tekanan politik dari penguasa Mesir dengan pembubaran Ikhwanul Muslimin, penahanan beberapa tokohnya, dan sebagainya. Pandangan ini diperkuat dengan pernyataan Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, bahwa gerakannya bersifat menyeluruh, tidak hanya politik melainkan juga sosial, pendidikan, kesehatan, seni, dan sebagainya.²¹

Seiring dengan perkembangan politik yang menerapkan pemilihan secara langsung (*one man one vote*) dukungan masyarakat menjadi kata kunci. Pemimpin tarekat dengan kharismanya yang optimal merasa akan mendapat dukungan tidak hanya dari sang murid melainkan juga dari masyarakat sekitar. Ini penting dalam memperoleh dukungan suara. Pada saat inilah pimpinan tarekat mencoba memasuki dunia politik secara langsung, baik mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (DPR) maupun sebagai kepala daerah.

Teori ini akan nampak dalam berbagai kasus seperti akan dijelaskan kemudian.

D. BEBERAPA KASUS

Berbagai kasus berikut akan menguraikan beberapa gerakan tarekat memasuki dunia politik di berbagai negara, termasuk Indonesia, baik zaman pertengahan maupun di era modern saat ini.

1. Dinasti Syafawi.

Dinasti Syafawi didirikan tahun 1502 oleh para pemimpin tarekat Azerbaijan.²² Nama Syafawi diambil dari nama pendirinya, yaitu Safiyuddin (1252-1334) yang menjadikan tarekat sebagai jalan hidup. Ketekunannya mengamalkan tarekat membuat pemimpin tarekat ketika itu Tajuddin Ibrahim Zahidi (1216-1301) menjadikannya sebagai menantu, dan kelak menggantikan posisi pimpinan tarekat ketika syekh wafat.²³ Posisi

¹⁸ Lihat: Hasan al-Banna, *Muzakkirat Da'wah wa al-Da'iyah* (Mesir: Dar asy-Syihab, 1985), hlm. 202-203. Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought* (London: Mcmillan Publishing, 1982), hlm. 84.

¹⁹ Al-Husaini, *Ikhwanul Muslimin* (Jakarta: Grafiti Press, 1983), hlm. 21 dan 35.

²⁰ Al-Husaini, *Ikhwanul Muslimin*, hlm. 21, dan *Ensiklopedi Islam*, hlm. 353.

²¹ Hasan al-Banna, *Muzakkirat* hlm. 156-157.

²² P.M. Holt, dkk., *The Cambridge History of Islam*, vol 1A (London: Cambridge University Press, 1970), hlm. 394.

²³ Allauche, *The Origius and Development of The Ottoman, Savafit Contsict* (Michigan University, 1985), hlm. 96.

sebagai pimpinan tareqat dijadikan sebagai kesempatan memerangi masyarakat yang mengingkari agama atau menciptakan bid'ah dan kesesatan. Melalui gerakan ini aktifitas tareqat beralih tidak hanya sebatas pengamalan agama dalam bentuk zikir dan latihan kerohanian, melainkan meluas ke dalam hal-hal lain, aqidah, syari'ah, dan mu'amalah.

Gerakan ini kemudian dilanjutkan oleh para penerus gerakan Syafiyuddin, seperti Juneyd, Haidar, dan Ismail. Pada zaman Ismaillah gerakan tareqat ini kemudian berujung pada berdirinya sebuah dinasti yang disebut dengan Syafawiyah pada tahun 1501. Dengan demikian Ismail adalah penguasa pertama dan berkuasa sekitar 23 tahun (1501-1524).

Dalam era kekuasaan Ismail dinasti Syafawiyah mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Kemajuan politik ditandai dengan perluasan wilayah ke daerah Asia Tengah. Kemajuan ekonomi ditandai dengan lancarnya aktifitas perdagangan antar benua, sehingga pelabuhan laut menjadi pusat ekonomi dan perdagangan. Kemajuan ilmu pengetahuan ditandai dengan lahirnya para ilmuan terkenal, seperti Bahauddin Syirazi yang ahli dalam berbagai bidang ilmu, Sadruddin Syirazi seorang filosof, Mir Damad seorang filosof dan teolog, dan para filosof dan teolog Persia lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan ini berlanjut pada bidang-bidang lainnya, seperti kemajuan seni dalam berbagai bidang, seperti seni ukir, seni tari, dan sebagainya.

Kemajuan ini terus berlanjut pada penguasa dinasti Syafawiyah seterusnya. Dengan demikian, dinasti Syafawiyah lahir dari sebuah gerakan tareqat kemudian menjadi sebuah kekuasaan politik yang mengembangkan kemajuan berbagai bidang, seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya seperti disebut di atas.

2. Dinasti Muwahhidun

Seperti dinasti Syafawi, dinasti Muwahhidun juga didirikan oleh para pemimpin tareqat di Afrika Utara, yaitu Muhammad ibn Tumart (wafat 524/1130). Melalui pendidikan agama yang konservatif dengan ciri khas mazhab Maliki, seperti kecenderungan di Afrika Utara, menggalang sebuah gerakan yang didukung oleh para pemimpin suku Berber. Nama Muwahhidun mengandung arti sebagai suatu gerakan yang menjadikan gerakan pengesaan Tuhan sebagai tema sentral. Penamaan gerakan ini sebagai gerakan mengesakan Tuhan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan melalui praktek-praktek keagamaan yang penuh dengan bid'ah dan khurafat. Untuk merubah masyarakat, maka tema gerakan disesuaikan dengan kondisi masyarakat

tersebut, dan inilah kekuatan dari Muwahhidun sehingga secara cepat mendapat dukungan masyarakat.²⁴

Didasarkan pada misi gerakan, Muhammad ibn Tumart menyebut dirinya sebagai al-mahdi sehingga mendapat dukungan penuh dari masyarakat sampai akhirnya berdirilah dinasti Muwahhidun. Dinasti ini berlangsung selama 139 tahun dalam perhitungan tahun masehi (1130-1269 M) dan 143 tahun dalam perhitungan tahun hijrah (524-667 H).²⁵

Dalam rentang waktu tersebut, dinasti Muwahhidun dipimpin oleh 14 orang khalifah, dengan Abul A'la al-Watsiq sebagai khalifah terakhir. Walau pada akhirnya dinasti ini jatuh, namun keberadaannya, selain mampu mengembangkan tasawuf juga mengembangkan bidang keilmuan lainnya. Dengan pusat kekuasaan di Seville, di sini muncul para ilmuwan dan filosof, seperti Ibn Thufayl dan Ibn Rusyd.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa gerakan tasawuf tidak bersifat eksklusif, melainkan interkonektif dengan keilmuan lainnya, seperti filsafat, kedokteran, dan sebagainya, yang berkembang di era dinasti Muwahhidun.

3. PPTI (Persatuan Pengamal Tareqat Islam).

PPTI atau Persatuan Pengamal Tareqat Islam adalah partai politik yang didirikan oleh Syekh H. Djalaluddin tanggal 23 Desember 1945. Pada awalnya organisasi ini bernama PTIM (Persatuan Tareqat Islam Malaysia) karena pengikutnya banyak berasal dari Malaysia, namun karena muncul kritikan sebagai organisasi yang tidak nasionalis, berbau Malaysia, kemudian namanya dirubah menjadi PPTI (Persatuan Pengamal Tareqat Islam) sehingga sifatnya lebih umum, termasuk Indonesia. Kemudian seiring dengan himbuan Drs. Muhammad Hatta, wakil presiden RI agar semua ormas beralih menjadi partai politik, Syekh Djalaluddin dan kawan-kawan merubah ormas PPTI ini menjadi organisasi politik.

Peralihan menjadi partai politik tentu membawa konsekuensi baru, seperti kemestian menjadikan Jakarta sebagai pusat dan membuka cabang di beberapa provinsi, akhirnya pusat pengendalian partai berpindah dari Bukit Tinggi ke Jakarta, ibukota Republik Indonesia. Peralihan ini juga meniscayakan PPTI aktif dalam kegiatan politik, tidak lagi hanya sekedar kegiatan zikir dan latihan kerohanian. Atas dasar itulah PPTI aktif dalam kegiatan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan mendirikan barisan

²⁴Mengenai trend gerakan Islam ini dapat dilihat pada: W. Wilson Cash, *The Moslem World in Revolution* (London: Edinburg House Press, 1926), dan C.E. Boswort, *The Islamic Dynasties*, terjemahan Ilyas Hasan *Dinasti-dinasti Islam* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 52.

²⁵ C.E. Boswort, *Dinasti-dinasti Islam*, hlm. 52.

²⁶ C.E. Boswort, *Dinasti-dinasti Islam*, hlm. 53.

Tentera Allah (*Jundullah*). Demikian juga PPTI ikut dalam kegiatan Pemilihan Umum pertama tahun 1955. Dalam masa kepemimpinan Syekh Djalauddin PPTI mengalami masa puncak, di samping karena figurnya yang kharismatis juga karena kelihaiannya politiknya sehingga ia mampu mengambil hati Soekarno, presiden RI ketika itu. Kedekatan ini memberinya dua manfaat sekaligus; *pertama*, dukungan Soekarno (pemerintah) kepadanya dan PPTI, sehingga bebas dari tekanan dan pembredelan. Manfaat *kedua* ialah menguatkan posisinya di kalangan pimpinan tareqat yang bersifat pesimis dengan peralihan memasuki dunia politik tersebut.

Namun demikian agak sulit diukur tingkat keberhasilan gerakan tareqat yang beralih ke politik ini, apalagi pasca wafatnya Syekh Djalauddin gerakan ini mengalami kemunduran sehingga tidak ada catatan yang signifikan. Terlepas dari hal itu yang pasti ialah bahwa, kaum sufi dan tareqat berupaya memasuki dunia politik yang agak tabu selama ini, dan sukses, paling tidak era kepemimpinan Syekh Djalaluddin.²⁷

4. Partai Cinta Damai.

Seiring dengan *euforia* politik setelah Indonesia memasuki era reformasi tahun 1998 bermunculan partai-partai baru. Jika di zaman Soeharto jumlah partai politik hanya tiga, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), maka di era reformasi bertambah puluhan lipat. Dalam Pemilu pertama era reformasi (tahun 1999) jumlah partai peserta Pemilu mencapai 48 partai, Pemilu kedua (tahun 2004) mencapai 24 partai, Pemilu ketiga (tahun 2009) mencapai 38 partai, dan pemilu keempat (tahun 2014) jumlah peserta pemilu berjumlah 14 partai. Salah satu dari peserta pemilu pertama era reformasi tersebut ialah Partai Cinta Damai, yang didirikan oleh Prof. Kadirun Yahya, pimpinan tareqat Naqsyabandiyah Pancabudi Medan yang dideklarasikan pada tanggal 17 Oktober 1998 dengan basis umat Islam dan pengamal tareqat Naqsyabandiyah.

Kelahiran partai ini tentu memiliki kisah tersendiri yang perlu dicatat untuk melihat aksi politiknya. Banyaknya surau (tempat latihan rohani) tareqat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya tentu menjadi sasaran politisi untuk mendapatkan dukungan. Para politisi berdatangan silih berganti ke surau tersebut dan tentu dengan misi meminta dukungan. Sejauh silaturahmi tentu bukanlah menjadi persoalan. Persoalan muncul ketika dihadapkan pada pertanyaan, "lalu calon mana yang harus didukung". Seiring dengan

²⁷ Setelah Syekh Djalauddin wafat posisinya digantikan oleh para pengikutnya yang berupaya mempertahankan reputasi PPTI, seperti Syekh M. Idrus Bahauddin, BA, Syekh Ahmad Faisal, SH, MH, dan sebagainya. Bandingkan: <http://persatuanpengamal-thareqatislam.blogspot.cpm>.

tatakrama tareqat, “semuanya menunggu petunjuk pimpinan tareqat”, hal ini tentu menimbulkan pemikiran baru, mengapa bukan pimpinan tareqat saja yang didukung. Di sinilah benih memasuki dunia politik (membentuk partai) muncul.

Benih ini kemudian disuburkan oleh keinginan lain untuk mengambil peran dalam Indonesia yang berubah dengan sebuah harapan jangan sampai perubahan menuju ke arah yang lebih kering dari nilai-nilai Islam dan zikrullah. Mau tidak mau langkah konkrit harus diwujudkan walau sedikit merubah haluan lama. Inilah mungkin yang menjadi dasar pertimbangan mengapa Partai Cinta Damai dibentuk.

Seperti partai lain, tujuan didirikannya Partai Cinta Damai sudah barang tentu berkeinginan untuk mengambil peran dalam perubahan Indonesia, sehingga Indonesia yang berubah tidak akan kering dari nilai-nilai keislaman. Hal ini nampak secara tersurat dan tersirat dari semboyan partai Cinta Damai, yaitu “Dari Zikrullah ke langkah nyata”. Semboyan ini tentu menyampaikan pesan bahwa zikir tidaklah hanya di ruang sempit di keheningan malam, melainkan harus dalam dunia terang dan nyata dan memberi makna bagi masyarakat secara luas.

Gambaran di atas memberikan konsep bahwa keterkaitan sufi dengan politik memiliki rona tersendiri. Dalam Pemilu Tahun 1999 memang hasil yang diraih belumlah signifikan, namun hal ini menjadi catatan penting betapa tareqat ingin melibatkan diri dalam kehidupan nyata, tidak lari dari tanggung jawab politik, seperti diajukan para ahli.²⁸

5. Dalam konteks kehidupan modern di Indonesia, di salah satu provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB) tampil seorang gubernur dengan yang dipandang memiliki latar belakang tareqat. Ciri tareqat begitu kuat karena sebutan Tuan Guru sebagai gelar tareqat begitu melekat pada gubernur ini. Status sebagai pengamal tareqat, nampaknya tidak membuatnya bersifat fatalis, bahkan mendapat berbagai penghargaan dari Pemerintah pada era kekuasaannya. Selain sebagai gubernur termuda, beliau juga meraih prestasi lainnya, seperti “The best dedicated governor in developing in MICE industry”,²⁹ mendapat bintang Maha Putra dari presiden SBY tahun 2012, dan sebagainya.³⁰

²⁸ Lihat: Martin van Bruinessen, *Tareqat*, hlm. 27-28.

²⁹ Penghargaan yang diraih tahun 2011 ini adalah sebagai peran sertanya dalam mengembangkan wisata, industri, seni, dan ekonomi secara umum.

³⁰ Penghargaan lainnya ialah seperti tahun 2010 memperoleh penghargaan sebagai “The Best Province Tourism Developmen”, tahun 2012 meraih penghargaan sebagai gubernur yang terbaik dalam pembinaan PNPM, dan sebagainya.

Kasus lainnya ialah di Malaysia, yaitu Menteri Besar Kelantan, yaitu Tok Guru Nik Aziz. Nama lengkapnya ialah Tuan Guru Dato' Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz bin Nikmat, lahir tanggal 10 Januari 1931 dan wafat tanggal 12 Februari 2015 dalam usia 84 tahun. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Besar (sejenis gubernur di Indonesia) sejak tahun 1990 sampai 2013. Usai menghabisi jabatan tersebut diamanahkan sebagai penasehat PAS, salah satu partai Islam di Malaysia. Kehidupan sufi yang diterapkan membuatnya mendapat sambutan masyarakat, dan karena itu pula beliau menerapkan Gerakan Anti Korupsi (GERAK). Melalui gerakan ini beliau mendapat prediket sebagai provinsi paling bersih di Malaysia, dan tahun 2009 dicatat sebagai salah seorang dari 50 pemimpin Muslim yang paling berpengaruh (*The 50 Most Influence Muslims*).³¹

Revolusi Islam Iran yang dimotori oleh para mullah dengan Ayatullah Ruhullah Khomeini sebagai figur sentralnya dipandang sebagai gerakan yang memiliki karakter sufi khas Iran, karena memang dalam tradisi Islam di Iran, setiap tokoh agama harus menguasai fiqh, kalam, falsafah, dan tasawuf.³²

E. Daya Dukung dan Tantangan

Dengan mengajukan beberapa kasus di berbagai belahan dunia di atas jelaslah bahwa keterlibatan kaum sufi dalam bidang politik memiliki peluang, sehingga sufi menjadi politisi bukanlah hal yang mustahil. Peluang itu tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam ialah dari ajaran dan sistem keanggotaan dari sufi dan tareqat. Dari segi ajaran, adanya tuntutan penyucian jiwa diri dan orang lain menjadi pendorong penting.

Sedangkan daya dukung dari keanggotaan ialah tataberhubungan pimpinan tareqat dengan anggota (murid) dan pemimpin di bawahnya (khalifah) yang begitu kuat. Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam tradisi tareqat terdapat 10 adab murid kepada guru/pemimpin tareqat, sebagai berikut:³³

1. Seorang murid harus meyakini bahwa maksud dan tujuan suluknya tidak mungkin berhasil tanpa perantaraan gurunya. Karena jika seorang murid merasa bimbang dan ingin berpindah kepada guru lain, maka hal tersebut menjadi sebabnya *hirman* (terhijab) oleh *nur* gurunya tersebut, yang menghalangi sampainya pancaranberkah (*al-fayd al-rahmani*). Hal ini bisa tidak terjadi kalau kepindahan murid kepada guru yang lain itu atas izin yang Jelas (*sharih*) dari gurunya yang semula. Atau jika guru yang pertama

³¹ Lihat: www.wikipwdi.org, topik Nik Abdul Aziz Nik Mat.

³² Lihat Mislany: W. Wilson Cash, dalam bukunya *The Moslem World in Revolution* (London: Edinburg House Press, 1926), menjadikan revolusi Islam Iran sebagai revolusi penting dalam gerakan Islam.

³³Yaitu adab 1 sd 18, lihat: Siddiq, *Mengenal Ajaran tareqat dalam Aliran Tasawuf*(Surabaya: Putra Pelajar, 2001), hlm. 45.

ternyata syari'at atau tarekatnya batal, dalam arti tidak cocok dengan syari'atnya Rasulullah. Jika demikian, maka seorang murid harus pindah kepada guru yang lebih sempurna dan lebih *zuhud*, lebih *wara'* dan lebih luas ilmu syari'at dan tarekatnya. Di samping itu harus dicari yang lebih selamat hatinya dari sifat tercela. Lagi pula ia memang seorang mursyid yang mendapat izin (*bai'at*) sebagai mursyid dari mursyid sebelumnya.

2. Seorang murid harus pasrah, menurut dan mengikuti bimbingan guru dengan rela hati. Ia juga harus melayani (*khidmat*) guru dengan rasa senang, rela dan lkhlas hatinya hanya karena Allah. Karena *jauhar*-nya *iradah* (kehendak) dan *mahabbah* (kecintaan) itu tidak dapat jelas kecuali menurut, patuh dan *khidmat* (mengabdikan).
3. Jika seorang murid berbeda paham (pendapat) dengan guru, baik dalam masalah *kuliyah* (universal) maupun *juz'iyah* (sektoral), masalah ibadah maupun adat, murid harus mutlak mengalah dan menuruti pendapat guru karena menentang (*i'tiradl*) guru itu menghalangi berkah dan menjadi sebab akhir hayat yang tidak baik (*su'ul khatimah*). *Na'udzu Billah min dzalik*. Kecuali jika guru memberikan kelonggaran kepada murid untuk menentukan pilihannya sendiri.
4. Murid harus meninggalkan sejauh-jauhnya semua hal yang dibenci gurunya sekaligus turut membenci segala yang dibenci gurunya.
5. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan (*ta'bir*) terhadap berbagai masalah seperti: impian, dan isyarat-isyarat, walaupun ia lebih ahli dari gurunya dalam hal itu. Akan tetapi sampaikan hal itu kepada guru dan jangan meminta jawaban. Tunggu saja jawabannya pada waktu yang lain dan kalau tidak dijawab maka diamlah. Yakinkanlah diamnya guru karena ada hikmah. Dan apabila murid ditanya guru, atau diperintahkan menerangkan sesuatu, maka ia harus menjawab seperlunya.
6. Merendahkan suara di majelis gurunya dan jangan memperbanyak bicara dan tanya jawab dengan gurunya, karena semua itu akan menjadi sebabnya *mahjub* (tertutup hatinya).
7. Jika ingin menghadap guru harus disesuaikan dengan waktu yang tepat, tidak menghadap guru dalam waktu sibuk, atau waktu istirahat. Dan jika menghadap, jangan bicara sesuatu kecuali yang menyenangkan hati guru serta harus tetap menjaga kesopanan (*khudlu'* dan *tawadhu'*), jangan memandang ke atas, melihat kanan-kiri, atau bicara dengan teman. Tetapi menghadaplah dengan penuh perhatian terhadap perkataan guru. Hal ini penting karena kejelekan tatakrama (*su'ul adab*) kepada guru membuat hati tertutup (*hirman*) dari pencerahan (*futuh*). Dan jangan lama-lama berhadap-hadapan dengan guru tetapi

sekedar perlunya kemudian segera memohon diri, kecuali jika dicegah oleh guru, maka juga harus menurut.

8. Tidak boleh menyembunyikan rahasia kepada guru, tentang kata hati, impian, *kasyaf* (pandangan indra keenam) maupun keluarbiasaannya (*karamah*)-nya. Harus disampaikan dengan berterus terang.
9. Murid tidak boleh menukil pernyataan guru kepada orang lain, kecuali sekedar yang dapat dipahami oleh orang yang diajak bicara. Dan itupun perkataan-perkataan yang diizinkan untuk disebar luaskan.
10. Jangan menggunjing, mengolok-olok, mengumpat memelototi, mengkritik dan menyebarkan aib guru kepada orang lain. Dan murid tidak boleh marah walaupun kenginannya dihalangi sang guru tareqat. Seorang murid harus meyakini bahwa tindakan guru tersebut memiliki hikmah yang tersembunyi.

Kesepuluh poin ini bisa dikembangkan lagi kepada 15 poin berdasarkan pandangan ahli lainnya, sebagai gambaran dari betapa pentingnya akhlaq murid kepada mursyid.³⁴ Adanya kewajiban murid mengikuti sang pemimpin tareqat tentu merupakan daya dukung yang kuat bagi kesuksesan pimpinan tareqat mendapat dukungan sebagai penguasa politik.

Namun demikian, bagaimanapun, keterlibatan kaum sufi dengan tareqat ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah memudahkan internalisasi nilai-nilai Islam bagi masyarakat luas tidak hanya sebatas pengikut tareqat saja. Jika pimpinan tareqat tampil sebagai penguasa eksekutif hal ini memberinya peran langsung sebagai “role model” sehingga memberinya ruang yang lebih luas menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan praktis. Jika pimpinan tareqat berkedudukan sebagai anggota legislatif, sesuai dengan tupoksinya, akan memberinya ruang merumuskan kebijakan dan ketentuan bagi upaya penyeharian ajaran Islam melalui pendekatan legalis formal.

Kedua hal ini memang telah diperankan para pemimpin ketika tampil sebagai penguasa eksekutif (raja, kepala daerah) sehingga nuansa Islam lebih hidup dalam kehidupan masyarakat. Inilah kekuatan yang penting dicatat dengan terjunnya pimpinan tareqat dalam kancah politik. Sejauh ajaran Islam seperti tertuang dalam al-Qur’an³⁵ dan hadits³⁶ serta

³⁴Ke-15 poin adab murid kepada guru tersebut dapat dilihat pada: Syihabuddin Suhrawardi, *Awarif al-Ma’arif*, edisi terjemahan (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 46.

³⁵Dalam al-Qur’an terdapat dua kata yang menggambarkan adanya kekuasaan politik, yaitu kata “imam” (Q.S. al-Furqan/25: 74), dan kata “khalifah” (Q.S. al-Baqarah/:30). Dua kata ini mengisyaratkan betapa pentingnya kekuasaan dalam Islam.

³⁶Hadits riwayat imam Muslim yang artinya: “Apabila kamu melihat kemungkaran rubahlah dengan tanganmu, jika tidak mampu (dengan tangan rubahlah) dengan lidahmu, dan jika tidak mampu (dengan lidah rubahlah) dengan hatimu, dan itu merupakan selemah-lemah iman” dijadikan sebagai rujukan betapa pentingnya

dipraktekkan Nabi Muhammad Saw dalam karir kenabiannya keterlibatan dalam bidang politik ini tentu sah-sah saja adanya. Dan perlu dicatat, seperti diajukan para ahli, bahwa sukses besar Nabi Muhammad Saw mengislamkan jazirah Arabia dalam waktu singkat ialah karena kedudukannya sebagaipenguasa politik (*khilafah*) dan agama (*risalah*) sekaligus.³⁷ Hal ini sudah barang tentu menjadi rujukan bagi pimpinan tareqat dengan memasuki kancah politik tersebut.

Sedangkan dampak negatif dari keterlibatan kaum sufi ini ialah adanya kecenderungan tareqat kehilangan karakter sebagai tareqat. Sejarah terlanjut mencatat bahwa yang namanya tareqat haruslah terlepas dari kehidupan duniawi, bagaimanapun bentuknya. Jika muncul fenomena kaitan erat tareqat dengan kehidupan, hal ini dipandang sebagai deviasi (penyelewengan) dari pengamalan ajaran tasawuf dan tareqat. Pandangan ini tentu memiliki dasar kuat jika merujuk pada ajaran pokok tasawuf/tareqat yaitu konsep zuhud. Zuhud dalam makna tradisional diartikan sebagai meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Hal ini diperkuat lagi dengan munculnya *sya'ir-sya'ir* sufi yang memandang dunia secara pesimis, seperti:

- a. "Dunia ibarat bangkai, barangsiapa yang mengejar bangkai sama dengan anjing" (*ad-dunya zhaifat faman thalabaha fahuwa kalbun*).
- b. "Dunia ibarat jembatan yang (hanya untuk) dilalui dan jangan membangun apapun di atas jembatan tersebut" (*ad-dunya ka all-qintharati tajuzu fiha wala ta murha*).

Sya'ir pertama yang menggambarkan dunia dengan bangkai merupakan gambaran pesimisme tersebut, karena yang namanya bangkai harus ditinggalkan. *Sya'ir* kedua sedikit optimis, di mana dunia diilustrasikan sebagai jembatan yang hanya untuk dilewati sementara, seperti dunia yang hanya dilewati sementara saja.

Dua hal di atas (dampak positif-negatif) jika tidak dipahami secara proporsional dan profesional akan mengarah pada kontroversi. Sebab itulah kemudian muncul gagasan menampilkan tasawuf/tareqat yang lebih berdamai dengan kehidupan. Gagasan ini dikemas dengan sebuah gerakan tasawuf modern atau tasawuf fungsional.³⁸ Gagasan ini dipandang

kekuatan politik dalam menegakkan kebenaran dalam mengamalkan ajaran Islam, karena hanya melalui kekuatan politik (seperti penguasa)-lah kegiatan melarang kejahatan dengan tangan mungkin dilakukan.

³⁷ Lihat misalnya: Philip K. Hitty, *History of The Arab* (Mcmillan Publishing, 1975).

³⁸ Terdapat dua buku yang merintis lahirnya tasawuf modern tersebut, yaitu buku Fazlurrahman yang berjudul *Islam*, dan karya HAMKA yang berjudul: *Tasawuf Moderen*. Kedua buku ini dipandang berjasa dalam

penting, selain dapat meredam konflik di atas, juga dapat menyeharikan nilai-nilai Islam yang relevan bagi setiap ruang dan waktu (*shalih likulli zaman wa al-makan*) sesuai dengan karakter dasar (*nature*) Islam dan cita-cita sucinya.³⁹

F. Penutup

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tareqat ialah jalan atau metode yang harus ditempuh seorang sufi dalam mendekati diri kepada Allah Swt. Jalan tersebut sejalan dan sebagai perumusan dari ajaran Islam, karena digali dari ajaran al-Qur'an, hadits, dan praktek sahabat dan tabi'in. Sedangkan politik ialah sebuah metode mengaktualkan nilai-nilai yang diamban melalui kekuasaan eksekutif dan legislatif.
2. Keterkaitan kaum sufi dengan politik tampil dalam dua bentuk, yaitu secara tidak langsung dan secara langsung. Secara tidak langsung ialah dengan memberikan dukungan kepada penguasa politik (kepala daerah), sedangkan secara langsung ialah dengan menjadi anggota legislatif (DPR) dan tampil sebagai khalifah/raja atau kepala daerah.
3. Ada tiga faktor kaum sufi memasuki kancah politik, yaitu kedekatan tokoh sufi dengan penguasa politik (penguasa), keinginan menyeharikan nilai-nilai Islam, dan tanggung jawab teologis.
4. Keterkaitan kaum sufi dengan politik ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah semakin memudahkan menyeharikan ajaran Islam dalam kehidupan yang lebih. Sedangkan dampak negatifnya ialah tergoresnya ajaran sufi yang asli yang dipahami secara tradisional yang pesimis. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut kehadiran tasawuf modern atau tasawuf fungsional menjadi kata kunci.
5. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat di antara kaum sufi dengan politik, yaitu sama-sama berupaya menyeharikan nilai Islam dalam kehidupan sebagai sebuah tanggung jawab teologis.

-o0o-

mengungkapkan wujud tasawuf yang fungsional tersebut, sehingga ajarannya relevan seiring perjalanan waktu dan pergeseran tempat.

³⁹ Ajaran Islam haruslah relevan dengan perkembangan zaman, karena Islam diperuntukkan bagi umat manusia kapan dan di mana saja. Prof.DR. Yusuf Qardhawi mengulas keterkaitan Islam dengan perkembangan zaman ini melalui bukunya: *Al-Islami Shaluhin Litathbiqi fi Kulli Zaman wa Makan* (Mesir: Mustafa Baby al-Halaby).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Atjeh, *Tareqat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Allauche, *The Origins and Development of The Ottoman, Savafit Contsict* (Michigan University, 1985).
- Amir Ali, *The Spirit of Islam*, terjemahan H.B. Yassin, *Api Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, cet.3, 1978).
- Benard Lewis, *The Encyclopedia of Islam*, vol.III, (London: Leszac & Co, 1960).
- C.E. Boswort, *The Islamic Dynasties*, terjemahan Ilyas Hasan *Dinasti-dinasti Islam* (Bandung: Mizan, 1993).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: 1982).
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta, 1992).
- Edward Mortimer, *Faith and Power*, terj. Enna Hadi Rahmani Astuti, *Islam dan kekuasaan*, (Bandung: Mizan, cet.I, 1405/1984).
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Bina Puspita, 1980).
- G.H. Jansen, *Militant Islam*, terj. Ahmahedi Mahzar, *Islam Militan* (Bandung : Perpustakaan Salman ITB, 1983).
- HAMKA, *Tasawuf Moderen*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985).
- Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought* (London: Mcmillan Publishing, 1982).
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, jilid II (Jakarta: UI Press, 1985).
- Hasan al-Banna, *Muzakkirat Da'wah wa al-Da'iyah* (Mesir: Dar asy-Syihab, 1985).
- Hasan al-Banna, *Majmu'ah Rasail*, (Mesir: Dar al-Syihab, tt.).
- Hasan Bakti Nasution, *Filsafat Pergerakan Islam* (Bandung: , 2013).
- HAR. Gibb, *Muhammadanism*, terj. Abu Salamah, *Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1983).
- Husein bin Muhsin bin Ali Jabir, *Membentuk Jama'atul Muslimin* (Jakarta : Gema Insani Press, 1991).
- Imam Suprayogo, *Kiyai dan Politik, Membaca Citra Poitik Kiyai* (Malang: UIN Malang, 1999).
- John O. Voll, *Tareqat-tareqat Sufi*, dalam John L. Esposito, *Dunia Islam Modern*, jilid 5 (Bandung: Mizan, 2001).
- Karya Anda, *Kamus Populer*, (Surabaya: Karya Anda, tt.).
- Luis Makluf, *Al-Munjis fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986).
- Martin van Bruinessen, *Tareqat Naqsyabandiyah di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1994).
- Martin van Bruninessen, *Pesanteren dan Tareqat* (Bandung: Mizan, 1985).

- Maryam Jameelah, *Para Mujahid Agung* (Bandung: Mizan, cet.II, 1409/1989).
- Michael Yusse, *Revolt Against Modernity*, (Leiden:EIJ. Brill, Leiden, 1985).
- Mircea Eliade, Ed., *The Encyclopedi of Religion*, volume X “Muslim Bratherhood” (New York: Macmillan Publishing, 1987).
- Musa Al-Husaini, *Ikhwanul Muslimin* (Jakarta: Grafiti Press, cet.I, 1983).
- M.Z. Hasan, *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).
- Philip K. Hitty, *History of The Arab* (Mcmillan Publishing, 1975).
- P.M. Holt, dkk., *The Cambridge History of Islam*, vol 1A (London: Cambridge University Press, 1970).
- Rauf Syalabi, *Hasan al-Banna wa Madrastuhu Ikhwanul Muslimin* (Mesir: Dar asy-Sihab, tt.).
- R.M. Gillrist, *Principle of Political Science*, (Madras: Grient Longmans, 1957).
- Siddiq, *Mengenal Ajaran tareqat dalam Aliran Tasawuf*(Surabaya: Putra Pelajar, 2001).
- Syihabuddin Suhrawardi, *Awarif al-Ma'arif*, edisi terjemahan (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998).
- Yusuf Qardhawi, *Al-Islami Shaluhin Litathbiqi fi Kulli Zaman wa Makan* (Mesir: Mustafa Babi al-Halabi).
- W. Wilson Cash, *The Moslem World in Revolution* (London: Edinburg House Press, 1926).